

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah)

Elni

elni_amir@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The objective of this research is to determine and analyze the development of local revenues, specific allocation funds, and capital expenditures and the effect of local revenues and specific allocation funds on capital expenditures both simultaneously and partially. The sample in this research consists of 11 regencies/cities in Central Sulawesi and sample technique is purposive sampling. Method of data analysis is trend analysis and multiple linear regressions. The results shows that in average, the growth of local revenues tends to increase within 3 budget years, while the average growth of specific allocation funds tends to decrease. The average growth of capital expenditure tends to decrease in accordance to the average growth of specific allocation funds. Simultaneous test indicates that local revenues and specific allocation funds affect the capital expenditure positively and significantly. Partial test shows that local revenues and specific allocation funds affect capital expenditure positively and significantly. Determinant coefficient demonstrates the R-square value of 0,667 that shows that 66,70% of capital expenditure affected by local revenues and specific allocation funds; the remaining of 33,30% affected by other variables that are not studied.

Keywords: *Local Revenues, Specific Allocation Funds, and Capital Expenditures*

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Penegasan ini menunjukkan bahwa bagi daerah-daerah yang memiliki celah fiskal yang tinggi perlu memperkuat struktur anggaran belanjanya, ini bukan berarti daerah-daerah yang celah fiskal yang rendah tidak perlu memperkuat struktur belanja. Dengan memperkuat struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini penting karena anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan daerah merupakan anggaran publik. Alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul-betul dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang produktif (Halim, 2001).

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abimanyu (2005) yang menyatakan bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD ini adalah untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang kemudian dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD (Siregar, 2001).

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh (UU No. 33/2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah (UU No. 33/2004).

Subekan dalam Martini dkk (2014) mengemukakan bahwa DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus baik secara simultan maupun parsial terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka hipotesis yang dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh

2. signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif verifikatif. Nazir (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa. Sedangkan metode verifikatif menurut Hasan (2008) yaitu menguji kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan digunakan untuk menguji. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran akurat dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat hubungan antara fenomena-fenomena objek yang diteliti.

Menurut analisis dan jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk angka. Sugiyono (2005) menyatakan bahwa data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (skoring).

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara masih berupa kabupaten baru hasil pemekaran sehingga belum tersedia laporan keuangannya. Oleh karena itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang meliputi: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi,

Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : variabel bebas yang terdiri dari : Pendapatan asli daerah (X_1) dan dana alokasi khusus (X_2) serta variabel terikat yaitu belanja modal (Y). Defenisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (X_1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen PAD meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana alokasi khusus (X_2)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Belanja modal (Y)

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Analisis Trend

Analisis trend bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Teknis analisis ini biasanya digunakan untuk

menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih (Harahap, 2004).

Analisis trend dalam penelitian ini menggunakan analisis *time series* yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y=Perkembangan PAD, DAK dan Belanja Modal

a= besarnya Y, saat X = 0

B= besarnya Y, jika X mengalami perubahan

X= Waktu

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Modal. Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis terhadap data penelitian (uji asumsi) yang meliputi : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya (PAD) agar penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dapat lebih optimal.

Pertumbuhan realisasi penerimaan PAD Tahun 2012 hingga 2014 pada 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dalam%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2012	2013	2014	
1	Banggai Kepulauan	-	6.10	11.81	8.96
2	Banggai	-	34.36	36.75	35.56
3	Morowali	-	28.19	(35.25)	(3.53)
4	Poso	-	27.40	99.79	63.59
5	Donggala	-	14.20	40.83	27.51
6	Tolitoli	-	21.63	103.65	62.64
7	Buol	-	82.41	17.72	50.07
8	Parigi Moutong	-	15.94	128.35	72.14
9	Tojo Una-Una	-	8.83	51.00	29.92
10	Sigi	-	19.12	70.98	45.05
11	Palu	-	23.97	55.49	39.73

Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 di 11 Kabupaten/Kota sebagaimana pada Tabel 1 menunjukkan besaran 39,24% dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran 72,14%. Sementara rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya terlihat bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan PAD cenderung menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.. Tingginya rata-rata pertumbuhan di Tahun 2014 didorong oleh tingkat pertumbuhan realisasi PAD di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Parigi Moutong yang relatif cukup tinggi yaitu mencapai 103,65% dan 128,35%. Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2014 yang sangat tinggi di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Parigi Moutong lebih didorong oleh peningkatan penerimaan yang bersumber dari pos lain-lain PAD yang sah.

Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus

Alokasi DAK pada dasarnya tergantung pada peran pemerintah daerah dalam mengusulkan program dan kegiatan yang akan didanai oleh DAK kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait dan meyakinkan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sementara dalam hal penyerapan anggaran DAK banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya dan sering dialami oleh pemerintah daerah adalah masalah penerbitan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan DAK. Keterlambatan terbitnya juknis tersebut

tentunya akan berdampak pada keterlambatan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan penerimaan DAK dapat pada 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (dalam %)

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2012	2013	2014	
1	Banggai Kepulauan	-	28,22	(15,57)	6,33
2	Banggai	-	10,98	19,68	15,33
3	Morowali	-	30,12	(11,44)	9,34
4	Poso	-	25,65	10,92	18,29
5	Donggala	-	16,21	(21,16)	(2,48)
6	Tolitoli	-	73,13	11,33	42,23
7	Buol	-	24,92	6,54	15,73
8	Parigi Moutong	-	22,34	0,67	11,51
9	Tojo Una-Una	-	38,35	5,71	22,03
10	Sigi	-	7,69	21,75	14,72
11	Palu	-	6,33	36,98	21,65

Pertumbuhan DAK kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selang Tahun Anggaran 2012-2014 secara umumnya berfluktuatif. Besar kecilnya alokasi DAK yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tergantung pada kebijakan pemerintah pusat melalui perhitungan dan kajian terhadap usulan-usulan dari pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kabupaten Tolitoli yaitu sebesar 42,23%, sedangkan Kabupaten Donggala merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan terendah yaitu -2,48%.

Pertumbuhan Belanja Modal

Pertumbuhan belanja modal pada 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Pertumbuhan Belanja Modal (dalam%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2012	2013	2014	
1	Banggai Kepulauan	-	13,91	(37,18)	(7,75)
2	Banggai	-	29,00	22,48	17,16
3	Morowali	-	14,67	(43,97)	(9,77)
4	Poso	-	(7,57)	37,82	10,08
5	Donggala	-	34,20	(9,96)	8,08
6	Tolitoli	-	60,74	1,96	20,90
7	Buol	-	30,89	10,65	13,85
8	Parigi Moutong	-	12,11	16,54	9,55
9	Tojo Una-Una	-	(17,57)	38,60	7,01
10	Sigi	-	7,28	15,36	7,55
11	Palu	-	104,66	7,80	37,49

Pertumbuhan belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. umumnya menunjukkan pertumbuhan yang menurun. Dalam kurun waktu waktu 3 (tiga) tahun anggaran, rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2013 yaitu sebesar 25,66%. Dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Kota Palu merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata belanja modal tertinggi yaitu mencapai 37,49%, sedangkan Kabupaten Morowali merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata belanja modal terendah yaitu sebesar -9,77%.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabelvariabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X₁), dan dana alokasi khusus (X₂), sedangkan variabel dependen (Y) adalah belanja modal. Hasil analisis regresi linear berganda sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Belanja Modal				
Variabel	Koefisien	Standar	t	Sig
	Regresi	Error		
C	= 37,227,508,603,787	23,673,663,526,004	1.573	0.126
X1 = PAD	0.695	0.109	6.354	0.000
X2 = DAK	1,536	0.357	4.304	0.000
R-	= 0,817			
R-Square	= 0,667	F-Statistik	= 30,035	
Adjusted R-Square	= 0,645	Sig. F	= 0,000	

Sumber: Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 37227508603.787 + 0,695X_1 + 1.536X_2$$

Persamaan regresi berganda

- menunjukkan bahwa:
1. Untuk nilai constanta sebesar 37227508603.787 berarti belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 37227508603.787.
 2. Pendapatan asli daerah (X_1) dengan koefisien regresi 0,695 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pendapatan asli daerah dan belanja modal. Artinya bahwa setiap penambahan pendapatan asli daerah 1 satuan akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,695 satuan pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
 3. Dana alokasi khusus (X_2) dengan koefisien regresi 1.536 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara dana alokasi khusus dengan belanja modal. Artinya bahwa setiap terjadi penambahan dana alokasi khusus 1 satuan akan mengakibatkan terjadi penambahan belanja modal sebesar 1.536 satuan pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Pengujian Pengaruh Simultan

Hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai *R-Square* sebesar 0,667 atau sebesar 66,70%. Hal ini berarti bahwa sebesar 66,70% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana darurat, dana hibah, dan dana bantuan dari provinsi.

Selanjutnya dari hasil perhitungan diperoleh F_{hitung} sebesar 30,035 pada taraf nyata α sebesar 0,05 atau $\alpha < 0,05$ dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti.

2. Pengujian Pengujian Parsial

a. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Hasil perhitungan pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,695, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95% sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

b. Dana Alokasi Khusus (X_2)

Hasil perhitungan pada variabel dana alokasi khusus menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 1.536, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95% sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah maka daerah diberikan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu agar dalam penyelenggaraan kewenangan yang diberikan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan berdasarkan potensi yang ada di daerahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya sesuai dengan penjelasan pada UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Disamping diberikan kewenangan untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan dari potensi daerah masing-masing, daerah juga diberikan sumber pendanaan lain dari pemerintah pusat melalui dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Tujuannya adalah untuk membantu daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan dan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Dengan hanya mengandalkan sumber-sumber pendanaan dari potensi daerahnya masing-masing, daerah akan kesulitan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat karena tidak semua daerah memiliki potensi sumber pendanaan yang besar.

Kaitannya dengan otonomi daerah, maka tugas utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar kebutuhan masyarakat, tetapi tidak semua daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu untuk membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah pusat memberikan bantuan pembiayaan melalui dana alokasi khusus (DAK). Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004, DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAK digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang sifatnya investasi bagi daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena sifatnya merupakan barang-barang investasi maka dapat dikatakan bahwa alokasi belanja DAK adalah belanja modal.

Untuk menggerakkan iklim investasi di daerah agar dapat berkembang dengan lebih cepat maka melalui Perpres No. 5 Tahun 2010, pemerintah pusat mengamanatkan kepada daerah untuk menganggarkan belanja modal minimal 30% dari total belanjanya. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik.

Pengalokasian belanja modal sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres tersebut belum sepenuhnya ditaati oleh pemerintah daerah karena kemampuan dana dan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan yang non fisik di daerah juga berbeda-beda. Oleh karena itu untuk membantu agar penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dapat lebih merata, pemerintah pusat memberikan alokasi DAK kepada daerah dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pemberian DAK tersebut tentunya diikuti dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK dalam APBD. Dana pendamping DAK yang dipersyaratkan tersebut pada umumnya pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan PAD yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dan pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dengan semakin meningkatnya penerimaan PAD maka belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah juga akan meningkat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi keuangan, sumber utama pendapatan daerah seyogyanya adalah PAD yang merupakan hasil pengelolaan potensi masing-masing daerah. Sementara dana perimbangan/dana transfer merupakan dana untuk membantu daerah agar tidak terjadi kesenjangan pendanaan antar daerah. Oleh karena itu sudah seyakinya daerah berpacu untuk meningkatkan penerimaan PADnya dengan tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber utama penerimaan PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu

untuk membantu daerah dalam mengembangkan penerimaan PAD dari pajak dan retribusi, pemerintah menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Permasalahan pengalokasian dana untuk belanja daerah seringkali menjadi dilemma bagi pemerintah daerah, di satu sisi dalam penyusunan anggaran harus mengacu pada pedoman penyusunan APBD sementara di satu sisi pemerintah daerah juga harus memperhatikan program strategis di daerah masing-masing. Disamping itu untuk mengalokasikan anggaran belanja modal sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 rata-rata sebesar 28% pertahun pemerintah daerah juga mengalami kesulitan karena kendala paling utama adalah keterbatasan anggaran. Belanja daerah paling tinggi saat ini di daerah pada umumnya pada belanja pegawai (gaji dan tunjangan) pada belanja tidak langsung karena rata-rata lebih dari 60%, sementara penerimaan PAD kontribusinya terhadap total pendapatan rata-rata hanya sebesar 5,63%.

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan adanya pengaruh PAD terhadap belanja modal sekaligus sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martini dkk (2014), Tuasikal (2008) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Sugiartiana (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan adanya pengaruh DAK yang positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dengan semakin meningkatnya penerimaan DAK akan meningkatkan pula belanja modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Hasil tersebut didukung pula dengan uji deskriptif dimana terlihat tingkat pertumbuhan DAK cenderung sebanding lurus dengan pertumbuhan belanja modal. Hal ini sangat jelas terlihat pada pertumbuhan pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

DAK merupakan bagian dari dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat karena mengingat bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penyaluran DAK kepada daerah dengan mengacu pada kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Secara umum, alokasi anggaran DAK digunakan untuk mengadakan infrastruktur pelayanan masyarakat sehingga dalam mengalokasikan belanja pada APBD diarahkan pada belanja modal dengan mengacu pada petunjuk teknis dari kementerian terkait. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DAK yang diterima oleh daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD.

Hasil uji parsial tersebut didukung pula dengan hasil kajian deskriptif dimana terlihat naik turunnya belanja modal mengikuti tingkat penerimaan DAK. Di beberapa kabupaten/kota menunjukkan bahwa penerimaan DAK lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan PAD. Dengan kondisi tersebut, bila hanya mengandalkan penerimaan PAD maka daerah cenderung belum mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dengan memadai. Oleh karena itu peran DAK dalam membantu daerah untuk menyediakan infrastruktur menjadi sangat penting agar kesejahteraan masyarakat di daerah dapat lebih meningkat.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut membuktikan adanya pengaruh DAK terhadap belanja modal dan hasil ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martini dkk (2014) dan Tuasikal (2008) yang hasil penelitiannya menemukan adanya pengaruh DAK terhadap belanja modal..

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aspek perkembangan dapat dijelaskan bahwa :
 - a. Realisasi penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 2012 – 2014 sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian pula halnya dengan pertumbuhannya yang memperlihatkan rata-rata pertumbuhan yang positif..
 - b. Realisasi penerimaan DAK dari Tahun Anggaran 2012 – 2014 sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Sementara dari pertumbuhannya terlihat fluktuatif dan menurun.
 - c. Realisasi belanja modal dari Tahun Anggaran 2012 – 2014 secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Sementara dilihat dari rata-rata pertumbuhannya belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2010.
2. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Rekomendasi

1. Hendaknya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengelola PAD lebih mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan PAD yang ada di daerahnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melalui kajian-kajian terhadap beberapa regulasi yang berhubungan dengan upaya peningkatan penerimaan PAD.
2. Mengingat bahwa penerimaan PAD masih belum memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, hendaknya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah lebih berperan aktif mencari sumber-sumber pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun dari sumber-sumber lainnya seperti mengupayakan melakukan pinjaman daerah. Khususnya pada pinjaman daerah, pendanaan yang diperoleh di alokasikan untuk belanja modal yang sifatnya investasi yang menghasilkan agar dapat meningkatkan penerimaan PAD.
3. Hendaknya kabupaten/kota di Sulawesi Tengah lebih memprioritaskan APBD pada belanja modal yang dapat menambah nilai ekuitas dana investasinya terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat maupun belanja modal yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan belanja lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Andi Mattulada Amir, S.E, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Vita Yanti Fattah, S.E., M.Si. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong

lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bappeki Depkeu.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (sebuah studi kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia) *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4); 346-357.
- _____, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafrin., 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (statistik Inferensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi Offset.
- _____. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Martini , Ni Luh Dina Selvia, Wayan Cipta, I Wayan Suwendra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Manajemen*. Volume 2. Tahun 2014.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta : YPKP.
- Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI*. Vol. 1, No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *tentang* Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang* Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.